



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu



POSITIF

KATEGORI BERITA:



NETRAL



NEGATIF

37 Honorer Dicatat ,Perjalanan Dinas Fiktif

BINTUHAN - Proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas tahun 2023 di Sekretariat DPRD (Setwan) Kaur masih terus bergulir. Fakta demi fakta pun terkuak, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur telah mendapatkan modus perbuatan melawan hukum yakni perjalanan dinas fiktif.

Data terhimpun, dari hasil penyidikan total ada sebanyak 37 tenaga honorer yang bekerja di Setwan Kaur namanya dicatat melakukan perjalanan dinas. Dalam kegiatan tersebut timbul kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. Sementara saat dikonfirmasi terkait dengan pengembalian kerugian negara para tenaga honorer tersebut keberatan, karena mereka sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan dinas di tahun 2023 tersebut.

Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, melalui Kasi Pidsus Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH, pun memastikan kalau modus ataupun upaya melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara di Setwan Kaur adalah perjalanan dinas fiktif itu juga dibuktikan dengan hasil audit dari BPK.

"Penyidikan terus bergulir, fakta yang kita temukan adalah perjalanan dinas fiktif di beberapa kegiatan perjalanan salah satunya salah mencatat kurang lebih 37 nama tenaga honorer," ungkap Bobbi.

Disampaikan Bobbi, tim penyidik saat ini masih melakukan proses penghitungan ulang Kerugian Negara dari perbuatan melawan hukum. Karena hasil penghitungan dari BPK yakni Rp 11 miliar tidak bisa dijadikan dasar mereka untuk melakukan penetapan tersangka.

"Sekarang juga masih dalam tahapan penghitungan ulang KN, dari perbuatan melawan hukum," ujarnya.

Bobbi menegaskan, sekarang juga telah mengantongi nama-nama yang bertanggungjawab terkait dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut. Akan tetapi, masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa di ditangkap. Kemungkinan besar setelah penghitungan ulang KN, Kejari Kaur akan segera melakukan penetapan tersangka yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini.

"Sesudah penghitungan KN, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM menanggapi kasus ini mengatakan Pemkab Kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Setwan Kaur.

Apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.

Sebagai informasi, Jumat, 24 Januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan pengeledahan di Setwan Kaur sebanyak 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan. (cil)